

Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur

(The Influence of Public and Private Investments to Increasing Human Development Index (HDI) in East Java)

Mohamad Miftahur Royan, Aisah Jumiati, Fajar Wahyu Prianto
Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121

e-mail : m.miftahur.royan@gmail.com

Abstrak

Salah satu indikator kesejahteraan dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Kesejahteraan merupakan produk pembangunan yang melibatkan kegiatan pemerintah dan swasta dalam berbagai bidang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi publik dan swasta terhadap peningkatan IPM di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan data panel tahun 2010-2013 pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil studi menunjukkan bahwa investasi publik dan swasta sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM di Jawa Timur. Peran Publik lebih besar dibanding swasta hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi yang relatif besar. Koefisien pada masing-masing kabupaten/kota berbeda, hal ini diduga karena kurangnya pemerataan investasi pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kata kunci: investasi publik, investasi swasta, indeks pembangunan manusia.

Abstract

One of the indicators of well-being can be measured by the Human Development Index (HDI), as measured from the level of health, education and purchasing power. Welfare is a product development involving government and private activities in various fields. This study aims to determine the effect of public and private investments to increase the HDI in East Java. The analytical method used is linear multiple regression using panel data in 2010-2013 in 38 districts / cities in East Java. The study shows that public and private investment are equally significant positive effect on improvement of HDI in East Java. Public greater role than the private sector this is indicated by the regression coefficient is relatively large. Coefficients in each district / city is different, it is suspected due to a lack of equity investment in each district / city in East Java.

Keywords: public investment, private investment, human development index

Pendahuluan

Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tiga komponen (BPS dan UNDP, 1997) dalam Sumiyati (2011) yaitu : (1) Kesehatan, diukur dengan angka harapan hidup (AHH), (2) Pendidikan, diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan angka partisipasi pendidikan yang telah ditamatkan atau rata-rata lama sekolah (RLS) dan (3) Ekonomi, diukur dengan standar hidup yang layak dengan pendekatan produk domestik regional bruto per kapita pada tingkat konsumsi riil perkapita atau kemampuan daya beli masyarakat. Pemerintah Jawa Timur merespon dengan lebih menfokuskan kearah kebijakan pembangunan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nyata

dan berkelanjutan dapat dicapai sehubungan dengan adanya otonomi daerah.

Kesejahteraan merupakan produk pembangunan yang melibatkan kegiatan pemerintah dan swasta dalam berbagai bidang. Pemerintah sebagai agen pembangunan memiliki beberapa fungsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pertama adalah fungsi alokasi, dengan jumlah sumberdaya yang terbatas akan dapat diperoleh hasil yang optimal. Kedua adalah fungsi distribusi, yang dimaksudkan agar sumberdaya dan hasil-hasil pembangunan dapat dipergunakan dan dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Ketiga adalah fungsi dinamisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga lebih dinamis dan berkembang, terakhir adalah fungsi stabilisasi, diharapkan pemerintah mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial serta politik, sehingga proses

pembangunan dapat berjalan secara lebih pasti. Meningkatnya peran pemerintah dapat dilihat dari besaran belanja pemerintah daerah. Belanja daerah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp54,01 Triliun pada tahun 2012 dan meningkat mencapai Rp33,10 Triliun pada tahun 2013. Hal ini bisa diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki semangat yang diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (BPS Jawa Timur, 2014).

Jawa Timur merupakan Provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut bisa dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. PDRB Jawa Timur pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.136.326,87 Milyar, tetapi apabila dilihat secara nasional, IPM Jawa Timur pada tahun 2013 menempati urutan ke-18 yaitu sebesar 73,54 yang berarti Jawa Timur merupakan daerah yang masih berada pada kriteria menengah dan masih dibutuhkan peningkatan kesejahteraan manusia.

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Komponen angka harapan hidup masih memerlukan adanya peningkatan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini apabila tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.

Nilai IPM kabupaten/kota di Jawa Timur menurut BPS Jawa Timur (2013) yaitu sebesar 72,83. Kota Malang menduduki nilai IPM tertinggi (78,43), disusul dengan kota Surabaya (78,33) dan kota Blitar (78,31). Kabupaten Sampang menduduki nilai IPM terendah di Jawa Timur (61,67).

Kenaikan IPM disebabkan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota seperti program dibidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dilihat dari nilai IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Misalnya, usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian (Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2008).

Dilihat dari dampaknya, investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu investasi publik ataupun swasta, karena investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran akan

mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen IPM juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat akan mengakibatkan jumlah peningkatan IPM lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan dalam masyarakat (Sumanto, 2012).

Menurut Kuncoro (2000), apabila dilihat secara makro ekonomi adanya ketimpangan distribusi pendapatan dapat terjadi karena perbedaan pola kepemilikan sumber daya. Pendapatan yang rendah akan mengakibatkan menurunnya jumlah tabungan dan investasi. Investasi yang rendah akan mengakibatkan terjadinya kekurangan modal yang mengakibatkan rendahnya produktifitas. Produktifitas yang rendah akan berdampak pada rendahnya pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang pengaruh investasi publik dan swasta terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory atau penelitian yang menjelaskan mengenai hubungan kausal antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1995). Menurut Hendarmin (2012) penelitian explanatory adalah penelitian untuk menguji dan menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen (sebab-akibat).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2010-2013, sehingga jenis data yang digunakan adalah data panel. Data panel adalah gabungan data time series dan data cross section (Widarjono, 2005).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, dan Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur yang diperoleh dari BPS Jawa Timur;
- Data investasi swasta (*private investment*), yang terdiri dari: 1) Investasi swasta domestik (*domestic private investment*), berupa: (i) Investasi rumah tangga (*household investments*), diprosisikan oleh data total

Kredit Masyarakat di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Bank Indonesia, dan (ii) Investasi industrial (*industrial investments*), diproksikan oleh data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur. 2) Investasi swasta asing (*foreign private investment*), diproksikan oleh data Penanaman Modal Asing (PMA) yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur;

c. Data investasi publik (*public investment*), berupa data Belanja Langsung dalam Dokumen Realisasi APBD di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel (*pooled regression model*). Model ekonomi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPM = f(IP, IS) \dots\dots\dots (3.1)$$

Dari model ekonomi 3.1 kemudian ditrasformasikan ke model ekonometrika regresi data panel dalam bentuk semi-log dapat ditulis sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha_1 + \beta_1 LogIP_{it} + \beta_2 LogIS_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.2)$$

Untuk mengetahui pengaruh investasi publik dan swasta pada masing-masing kabupaten/kota, dibutuhkan koefisien (*slope*) pada masing-masing kabupaten/kota, sehingga model ekonometrika yang digunakan adalah metode regresi panel *fixed effect model* dengan asumsi intersep dan slope berbeda antar individu (*all coefficients vary across individuals*). Model regresinya adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003:640-647):

$$IPM_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2t} + \dots + \alpha_{38} D_{38t} + \beta_1 LogIP_{it} + \beta_2 LogIS_{it} + \gamma_1 (D_{2t} LogIP_{it}) + \gamma_2 (D_{2t} LogIS_{it}) + \dots + \gamma_{73} (D_{38t} LogIP_{it}) + \gamma_{74} (D_{38t} LogIS_{it}) + u_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan :

- IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia
- LogIP_{it} = Investasi publik
- LogIS_{it} = Investasi swasta
- D_{it} = *Dummy variable* untuk setiap kota i
- α₁ = *Intercept*
- α₂, ..., α₃₈ = *Differential intercept*
- β₁, β₂ = *Slope coefficient*
- γ₁, ..., γ₇₄ = *Differential slope coefficient*
- u_{it} = *Error term*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil Regresi Data Panel dengan metode *Fixed Effect* adalah sebagai berikut :

$$IPM = 8,792856 + 4,014362 LogIP + 1,296885 LogIS + \mu$$

Berikut ini adalah penjelasan secara terperinci dari Persamaan regresi diatas:

1. Nilai konstanta sebesar 8,792856. Nilai tersebut menunjukkan bahwa IPM sebesar 8,792856 apabila variabel investasi publik dan swasta konstan.
2. Pengaruh investasi publik terhadap IPM sebesar 4,014362 artinya, apabila terjadi kenaikan investasi publik sebesar satu satuan, maka akan menaikkan IPM sebesar 4,014362.
3. Pengaruh investasi swasta terhadap IPM sebesar 1,296885 artinya, apabila terjadi peningkatan investasi swasta sebesar satu satuan, maka akan menaikkan IPM sebesar 1,296885.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa, investasi berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM di Jawa Timur, baik investasi publik maupun investasi swasta. Peran publik lebih besar dibanding swasta dalam mempengaruhi meningkatnya nilai IPM di Jawa Timur (*welfare state*). Besarnya nilai IPM mencerminkan besarnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli ekonomi keluarga. Dorongan dari pemerintah untuk memperbesar nilai investasi sangat dibutuhkan, dengan tidak meninggalkan peran swasta, agar dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic*). Investasi akan mendorong terjadinya akumulasi modal, penambahan stok bangunan gedung dan peralatan lainnya, meningkatkan output potensial suatu daerah dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting peran investasi dalam konteks ekonomi makro, agar ekonomi rakyat dapat berjalan dengan baik, sehingga kita bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran, di setiap kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi, dimana pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi juga akan berdampak pada pembangunan manusia yang diukur dengan IPM.

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa persoalan yang perlu untuk diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada komponen angka harapan hidup, masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Masalah ini jika tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM. Kenaikan IPM dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola

pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dipotret dalam angka IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya.

Peningkatan IPM di sebagian besar kota-kota di Jawa Timur lebih didorong oleh peran swasta (*private sectors*) daripada peran pemerintah (*public sectors*), kecuali Kota Malang, Kota Batu, dan Kota Kediri. Wilayah-wilayah ini dapat pula disebut sebagai *welfare society*. Wilayah kota yang masuk kategori tersebut antara lain: Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kota Madiun. Wilayah kabupaten yang masuk kategori tersebut antara lain: Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Mojokerto. Implikasinya, peningkatan peran sektor swasta dalam penyediaan layanan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga) akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satu indikatornya adalah peningkatan IPM.

Peningkatan IPM di sebagian besar kabupaten-kabupaten di Jawa Timur lebih didorong oleh peran pemerintah (*public sectors*) daripada peran swasta (*private sectors*). Wilayah-wilayah ini dapat pula disebut sebagai *welfare state*. Wilayah kabupaten yang masuk kategori tersebut antara lain: Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bondowoso. Wilayah kota yang masuk kategori tersebut hanya Kota Malang. Implikasinya, peningkatan peran pemerintah dalam penyediaan layanan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga) akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satu indikatornya adalah peningkatan IPM.

Kabupaten/kota dengan pengganda kuat dari kedua sektor pemerintah dan swasta hanya terjadi pada Kabupaten Pamekasan. Namun IPM kabupaten tersebut dalam 5 tahun terakhir tergolong rendah, masing-masing 63,81; 64,60; 65,48; 66,51; dan 67,17. Investasi pemerintah dan swasta kabupaten tersebut relatif lebih rendah dibanding daerah lainnya. Dilihat dari ranking menurut jumlah nilai investasi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, jumlah investasi rata-rata selama 4 tahun terakhir (2010-2013) kabupaten tersebut mendukung peringkat ke-21 untuk investasi publik/pemerintah dan peringkat ke-34 untuk investasi swasta yaitu masing-masing sebesar Rp 375.830,75 milyar dan Rp 1.513.090 triliun. Hal ini sesuai dengan hasil regresi pada kabupaten tersebut terlihat nilai koefisien investasi swasta lebih besar dibandingkan dengan koefisien investasi publik secara berurutan 8,785 dan 2,288 artinya, peningkatan investasi dari sektor swasta akan berdampak lebih besar untuk meningkatnya kesejahteraan

akan tetapi investasi publik juga berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, peningkatan investasi pemerintah dan investasi swasta pada kabupaten tersebut diduga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya diindikasikan oleh besaran IPM.

Kabupaten/kota dengan pengganda lemah dari kedua sektor pemerintah dan swasta adalah Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Bangkalan. Indikator tersebut menunjukkan rendahnya produktivitas investasi baik swasta maupun pemerintah dalam mendorong peningkatan IPM. Dengan demikian, peningkatan efektivitas perencanaan dan penganggaran publik (alokasi APBD) dalam penyediaan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga) dipandang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh investasi publik dan swasta terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur serta peranan investasi publik dan investasi swasta terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Hasil regresi data panel pendekatan *fixed effect model or least squares dummy variable (LSDV)* untuk mengkaji pengaruh investasi publik dan swasta terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur, secara simultan maupun parsial investasi publik dan swasta berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.
2. Hasil regresi data panel pendekatan *fixed effect model with assume All coefficients (intercept as well as slope) vary over individuals* untuk mengkaji peranan investasi publik dan swasta terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur, bahwa dari hasil koefisien regresi (*multiplier*) variabel investasi publik dan swasta dapat mengklasifikasi kabupaten/kota dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (a) kategori daerah dengan sektor swasta sebagai pendorong *human investment*, (b) kategori daerah dengan sektor pemerintah sebagai pendorong *human investment*, (c) kategori daerah dengan pengganda kuat dari kedua sektor, dan (d) kategori daerah dengan pengganda lemah dari kedua sektor.

Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan investasi publik dan swasta terutama yang bersifat pembangunan sumber daya manusia seperti investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana penunjang ekonomi

sehingga investasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga akan meningkatkan nilai IPM yang tinggi dan merata di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

2. Perlu peningkatan produktivitas dan efektivitas perencanaan dan penganggaran publik (APBD), terutama untuk sektor-sektor strategis dan yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga), sehingga dapat mendorong peningkatan IPM.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur*. <http://jatim.bps.go.id> [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional*. <http://www.bps.go.id>. [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. <http://www.bpm.jatimprov.go.id> [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Bank Indonesia. 2014. *Kajian Ekonomi Regional Triwulan IV - 2013*. <http://www.bi.go.id>. [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. <http://www.bpm.jatimprov.go.id> [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Gujarati, D., N. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. New York: McGraw-Hill.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 8 (3): 144-155.
- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei I*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sumanto, T.R.A. 2012. Hubungan Kecerdasan Emosional dan Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas XI Jurusan Otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman. *Jurnal Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Sumiyati, E. S. 2011. Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *E-Journal Kopertis Wilayah IV*.
- Widarjono, A. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.